

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**WORKSHOP PENYUSUNAN PPRG BAGI OPD PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mandat Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur harus mengintegrasikan isu-isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Untuk mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi ke dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur bagaimana mekanisme PUG dan mekanisme integrasi isu-isu gender dalam pembangunan daerah.

Pengintegrasian isu gender dalam program dan kegiatan pembangunan daerah sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama antar Organisasi Perangkat Daerah. Mengingat isu strategis gender harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, bukan secara parsial oleh masing-masing OPD. Mulai dari perencanaan yang disusun dengan memperhatikan data pilah gender dan mengakomodir pengalaman, masalah, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda dari kelompok masyarakat laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, lanjut usia dan lain-lain. Sampai kepada tahapan bagaimana perencanaan program tersebut diterapkan, dengan pengawasan dan monitoring program yang ketat, serta dilakukan evaluasi agar program yang telah disusun dapat diperbaiki dan disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan bagi para perencana dan focal point gender OPD dalam penyusunan PPRG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

## **B. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
4. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
10. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor: 00666/DPA/2022 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

## **C. Tujuan**

Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 bertujuan:

1. Memberikan pemahaman bagi perencana dan focal point gender untuk dapat menggunakan alat analisis gender dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga dapat memecahkan isu-isu strategis;
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam merumuskan dokumen anggaran responsif gender yang mampu menyelesaikan isu gender lintas OPD;
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun PPRG Tahun 2023 yang diutamakan dalam penanganan isu strategis, dan pengurangan kesenjangan IPM dan IPG Jawa Tengah.

#### **D. Hasil yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender tahun 2023 menggunakan alat analisis gender untuk meningkatkan angka IPG dan IDG dan penyelesaian isu strategis di Jawa Tengah.

## **II. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Penyelenggara**

Penyelenggara kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

### **B. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu - Jum'at, 23 - 25 Februari 2022

Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Gedung B Lt. V Kantor Sekda Prov. Jateng  
Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

### **C. Peserta**

Peserta Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur perencana dan focal point gender di masing-masing OPD tingkat Provinsi Jawa Tengah.

### **D. Fasilitator**

Fasilitator kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berasal dari LPPSP Jawa Tengah.

## E. Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Ceramah
2. Praktek penyusunan PPRG
3. Paparan peserta

## III. SUMBER DANA

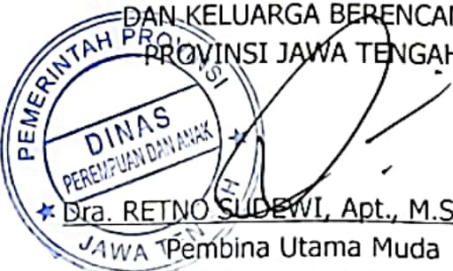
Sumber biaya Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutaman Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.

## IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang, Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
★ Dra. RETNO SUDEWI, Apt., M.Si., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681124 199310 2 001